

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DAN KESESUAIANNYA DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru)**

Neneng Salmiah, Indarti & Inova Fitri Siregar
Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning
Email: tachi.neneng@yahoo.com

ABSTRACT

Micro and SMEs are the group largest economic players in the Indonesian economy and one driving the forefront of economic development. As the shaft of a revival of the national economy, and not the sector without problems. In addition to the problem of capital, one of the problems faced by and as well as the weakness of Micro and SMEs is the application of appropriate accounting SAK ETAP with having an important role in providing information about the effectiveness and efficiency of the activities conducted during a period of accounting, called the financial report. This research aims to understand how the form of accounting on the application of SMEs Sukajadi sub-district the cooperatives and Micro and SMEs Pekanbaru and whether the application of its accounting have been in accordance with SAK ETAP was below. The technique of analysis of data used in this research is the descriptive analysis, namely with the fact analysis by comparing the theory or practice of accounting on the implementation of cooperative Sukajadi sub-district of Micro and SMEs and educated in Pekanbaru SAK ETAP alignment with and see. This analysis will provide a thorough accounting of how the businesses run by comparing it with the theory that there is, so can be seen whether the application of accounting at Sukajadi sub-district under the jurisdiction of Micro and SMEs and cooperative Pekanbaru especially in the preparation of the financial report is in accordance with SAK ETAP or not. Based on the result can only conclude that the average accounting for 40% of the dept. of cooperatives, and Micro and SMEs in Pekanbaru Sukajadi full of, or based on the steps on SAK ETAP and accounting. In other words, still accounting for 60 percent of the very simple, and it is not in accordance with The SAK ETAP. The research which the results of 83% of the respondents, SAK ETAP do not understand, 70% of respondents didn't use to make the accounting software with that timely and relevant, and 70% of respondents in the market does not provide additional information, and no financial information in the report presented, so that's incomplete. This is because the lack of knowledge, understanding as well as awareness of the importance of the application of a complete and in accordance with accounting. etap those respondents to apply accounting in a complete manner and in accordance in the formulation of. etap especially financial statement is in order to obtain information on business activities for one of an accounting period

Keywords : Micro and SMEs, SAK ETAP

ABSTRAK

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan salah satu pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM bukan sektor yang tanpa masalah. Selain masalah permodalan, salah satu masalah yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah penerapan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi, yang disebut dengan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan Apakah penerapan akuntansinya telah sesuai dengan SAK ETAP. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis dengan membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melihat kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penerapan akuntansi yang dijalankan oleh UMKM dengan membandingkannya dengan teori yang ada, sehingga dapat dilihat apakah penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terutama dalam penyusunan laporan keuangan sudah sesuai atau belum dengan SAK ETAP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-ratahanya 40% penerapan akuntansi bagi UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru secara lengkap atau sesuai tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi serta sesuai dengan SAK ETAP. Dengan kata lain, 60% penerapan akuntansi masih dalam bentuk sangat sederhana dan belum sesuai dengan SAK ETAP. Dimana dari hasil penelitian tersebut, 83% responden tidak memahami isi SAK ETAP, 70% responden tidak menggunakan software akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu dan relevan, dan 70% responden sebagai pelaku UMKM tidak memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasinya tidak lengkap. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP bagi pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam rangka memperoleh informasi tentang kegiatan usaha selama satu periode akuntansi.

Kata kunci : UMKM, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UMKM merupakan salah satu dari sektor riil yang paling banyak dijalani oleh pengusaha di Indonesia. Hal ini

dikarenakan pengelolaannya yang tidak sulit dan juga mudah untuk dilakukan oleh pihak dari kalangan manapun serta tidak membutuhkan biaya yang besar.

Dewasa ini peranan UMKM di Indonesia semakin penting dalam pembangunan perekonomian nasional, dimana selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan. Kondisi perekonomian di Indonesia yang kurang stabil membuat UMKM merupakan wahana yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Disamping membantu mengurangi tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan UMKM merupakan salah satu kunci Bangsa Indonesia keluar dari krisis. Jumlah UMKM di Indonesia 51.257 juta unit usaha, dari jumlah tersebut kurang dari 50,70 juta termasuk kategori usaha mikro, 520 ribu merupakan usaha kecil dan 39 ribu termasuk unit usaha menengah, 70% usaha unit mikro termasuk dalam kategori belum layak usaha dan belum *bankable* (tersentuh oleh bank). (Anggraeni : 2012).

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan salah satu pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Sebagai poros kebangkitan perekonomian nasional, UMKM bukan sektor yang tanpa masalah. Selain masalah permodalan, salah satu masalah yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah penerapan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP yang memiliki peranan penting dalam memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi, yang disebut dengan laporan keuangan. Disamping itu, laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat bagi kreditur (bank) dalam mengambil keputusan apakah UMKM tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak, padahal UMKM tersebut memiliki prospek yang baik sehingga seharusnya UMKM tersebut layak memperoleh pinjaman dari bank untuk pengembangan usahanya.

Penerapan akuntansi sangat penting bagi sebuah unit bisnis, termasuk UMKM. Penerapan akuntansi pada UMKM bukan hanya menjadikan pembukuan yang baik dan rapi, akan tetapi dapat memudahkan kerjasama yang berkaitan dengan keuangan, yaitu pendanaan pada pihak ketiga (Bank) dan untuk melihat keefektifan dan keefisienan usaha. Penerapan Akuntansi bagi pelaku bisnis maupun pelaku UMKM hendaknya sesuai dengan SAK ETAP. SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Laporan keuangan entitas meliputi: 1) Neraca; 2) Laporan laba rugi; 3) Laporan perubahan ekuitas; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM di Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, yaitu : sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun

2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan Tugas Pokok lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :“Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dibidang Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah”. Disamping itu, berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rincian Tugas Dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru adalah sebagaiberikut (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru):

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, Kecil, dan menengah;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah;
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- d. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang Koperasi,UMKM;
- e. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi dinas Koperasi, UMKM Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 dan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 adalah sebagai berikut (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru) :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan, dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM sangat berperan penting dalam upaya untukmemajukan UMKM. Untuk itu Dinas Koperasi harus bekerja dengan baik dalam pembinaan UMKM.Saat ini jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru

No.	Jenis	Jumlah
1.	Usaha Menengah	2,516
2.	Usaha Kecil	30,683
3.	Usaha Mikro	59,962
Jumlah		93,161

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru (2013)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru berjumlah 93.161 UMKM yang terdiri dari Usaha Menengah berjumlah 2.516, Usaha Kecil berjumlah 30.683 dan Usaha Mikro berjumlah 59.962. Jumlah UMKM tersebut terbagi dalam berbagai sektor seperti yang dapat kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2
Sektor UMKM di Kota Pekanbaru

No.	Sektor	Jumlah
1.	Pertanian	14,292
2.	Pertambangan dan penggalian	35
3.	Industri pengolahan	1,768
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	70
5.	Konstruksi	807
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	55,808
7.	Angkutan dan Komunikasi	6,431
8.	Keuangan, Sewa	243
9.	Jasa-jasa	13,707
Jumlah		93,161

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru (2013)

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa UMKM di Kota Pekanbaru terdiri dari 9 sektor yaitu sektor pertanian berjumlah 14.292, sektor pertambangan dan penggalian berjumlah 35, sektor industri pengolahan 1.768, sektor listrik, gas dan air bersih berjumlah 70, sektor konstruksi berjumlah 807, sektor perdagangan, hotel, dan restoran berjumlah 55.808, sektor angkutan dan komunikasi berjumlah 6.431, sektor keuangan dan sewa berjumlah 243, sektor jasa-jasa berjumlah 13.707. Kesembilan sektor tersebut tersebar pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan apakah penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru telah sesuai dengan SAK ETAP. Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari kalangan pelaku UMKM, pemerintah, maupun bagi kalangan pendidik.

TINJAUAN TEORITIS

Pentingnya penerapan SAK ETAP

Sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lilya (2014), bahwa Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, kepada para pelaku UMKM yang belum menerapkan akuntansi agar mulaimenerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bagi stakeholder untuk ikut serta dalam mendukung dan mengawasi implementasi SAK ETAP. Dukungan dan pengawasan ini tentunya akan membantu mendisiplinkan UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan serta membantu pihak perbankan dalam menganalisis kelayakan usaha dan pihak fiskus dalam memenuhi administrasiperpajakan. Selain itu perlu adanya suatu badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari SAK ETAP. Sehingga dengan adanya badan pengawas ini kedepannya seluruh UMKM yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP.

Disamping itu, manfaat dan keputusan usaha yang dijalankan berdasarkan akuntansi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ediraras (2010) antara lain:

- a. Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.
- b. Berguna sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi.
- c. Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang/jasa, dan lain-lain.
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- e. Untuk pengembangan usaha, keputusan untuk membuka atau menutup cabang.
- f. Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.
- g. Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
- h. Penambahan asset usaha.
- i. Promosi usaha.

Mengenai Penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara terus menerus pada usaha kecil, seperti yang dikemukakan oleh Golrida (2008) dalam Musmini (2012) memang penyajian laporan keuangan yang kontinyu pada usaha kecil harus memperhatikan prinsip konsistensi sehingga laporan dari periode sebelumnya dapat dibandingkan (komparabilitas) dengan periode berikutnya. Lebih lanjut Musmini (2012) mengemukakan bahwa prinsip lain yang harus dipegang dengan baik, tanpa toleransi adalah prinsip kesatuan usaha. Jadi kepentingan pemilik usaha dengan usahanya harus dipisahkan, seperti dalam hal keuangannya, keuangan perusahaan terpisah dengan keuangan pemiliknya.

Pengertian Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003:20) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi.

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Michell Suharli (2006:49) bahwa pengertian Siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus. Pengertian siklus akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa "Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan". Kesimpulan dari kedua definisi di atas, siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan.

Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Adapun siklus akuntansi tersebut adalah sebagai berikut (Soemarso : 2004 : 110) :

1. Transaksi dan bukti transaksi
2. Jurnal (*Journal*)
3. Buku besar (*Ledger*)

4. Daftar saldo (*Trial balance*)
5. Kertas kerja (*Worksheet*) dan jurnal penyesuaian (*adjustment*)
6. Laporan keuangan (*Financial statements*)
7. Jurnal penutup (*Closing Entries*)
8. Daftar saldo penutup (*Post closing trial balance*)
9. Jurnal pembalik (*Reversing entries*)

Menurut Horngren dkk (2007:4) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dikatakan demikian, karena semakin kita menguasai bahasa ini akan semakin baik pula kita menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupan, utamanya dalam usaha dan bisnis yang dilakoni. Apapun peranan kita dalam masyarakat, pasti kita pernah mengambil keputusan yang berhubungan dengan aspek keuangan, baik sebagai manajer, investor, politisi, kepala rumah tangga, atau mahasiswa. Karenanya dapat dipastikan kita akan merasakan manfaat dari memahami akuntansi.

Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi yang diinformasikan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan perkembangan usaha perusahaan. Informasi akuntansi memiliki kegunaan yang sangat bergantung pada pemakainya.

Menurut Hall (2001:18) ada tiga tujuan utama bagi sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen.
Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber ke para pemakai informasi melalui laporan keuangan yang dibutuhkan.
2. Untuk mengambil keputusan manajemen.
Sistem informasi akuntansi ini akan memberikan informasi kepada para manajer yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan tersebut.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari.
Sistem informasi menyediakan informasi bagi personil operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari secara efisien dan efektif.

Pengertian UMKM

Menurut Keputusan Presiden RI No.99 Tahun 1998, Pengertian Usaha Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Pengertian Usaha Kecil Menengah adalah sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati).

Menurut M.Tohar (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Total Asset.

Berdasarkan total asset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

2. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun.
Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
3. Berdasarkan Status Kepemilikan.
Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum tidak termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai.

Menurut Tulus Tambunan (2009:2) karakteristik Usaha kecil menengah dan mikro adalah sebagai berikut :

1. Jumlah perusahaan sangat banyak jauh melebihi jumlah usaha besar.
Terutama dari kategori usaha mikro, dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar diseluruh pelosok pedesaan, termasuk dikecamatan-kecamatan yang terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi pedesaan. Dengan kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi pedesaan sangat ditentukan oleh kemajuan pembangunan UMKM.
2. Sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. UMKM dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya usaha mikro bisa menjadi landasan bagi pengembangan usaha kecil, sedangkan usaha kecil bagi usaha menengah dan usaha menengah bagi usaha besarnya.
4. UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilitas tabungan atau investasi dipedesaan sementara pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.

Peranan UMKM

Peranan UMKM sangat berpengaruh besar terhadap jumlah pendapatan negara. Beberapa jenis UMKM menjadi sumber devisa Negara, dengan kata lain UMKM telah menjadi investasi bagi Negara, terutama UMKM dibidang pertanian

dan kerajinan. Sektor pertanian di Indonesia telah menjadi salah satu komoditas yang besar bagi kebutuhan dalam negeri atau bahkan sabagai komoditas ekspor bagi Indonesia. Tidak lain halnya dengan produksi kerajinan Indonesia, produksi kerajinan beberapa daerah di Indonesia tidak hanya laku di pasaran domestik saja, namun telah mampu merambah di pasar dunia khususnya Negara di Asia.

Selain bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tanpa disadari UMKM juga mampu mengurangi angka pengangguran dimasyarakat, sekaligus juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sebab banyaknya UMKM yang berdiri telah mampu memperkerjakan jutaan tenaga kerja yang tadinya menjadi pengangguran. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta lebih terjamin.

Permasalahan Dalam UMKM

Usaha kecil dan menengah mempunyai beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

I. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas
Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha kecil
Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

II. Faktor Eksternal

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha -pengusaha kecil dan pengusaha besar.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP adalah Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP sebagai solusi bagi SME (*Small Medium Enterprise*, ETAP)(Martani : 2011)

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik

kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah (Martani: 2011):

a) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai, yang dalam hal ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun walaupun demikian, bukan berarti informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan kemudian dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c) Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna

d) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan

e) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya.

f) Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bias. Penyusunan Laporan Keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat.

g) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi

h) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda

i) Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan .

j) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi bagi UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 150 UMKM. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini 30 UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria. Adapun kriteria-kriteria yg telah ditentukan sebagai berikut :

1. UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang berada dalam radius lebih kurang 500 meter dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru
2. UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dari berbagai sektor usaha.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terkait dengan penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, data primer ini peneliti dapatkan dari kuesioner yang penulis sebarakan kepada sampel yaitu Pelaku UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder, data sekunder penulis dapatkan melalui pencarian data-data yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari : 1) Penelitian Lapangan (*field research*), 2) Kuesioner, 3) Wawancara, dan 4) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis dengan membandingkan teori dengan kenyataan atau praktek tentang penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan melihat kesesuaiannya dengan SAK ETAP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data kuesioner yang disebarakan kepada 30 UMKMKecamatan Sukajadi BinaanDinas Koperasi dan UMKMKota Pekanbaru, diperoleh hasil olahan data seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner

NO	PERTANYAAN	Jawaban			Total		% Jawaban	
		Ya	Tidak			Ya	Tidak	
1	Apakah memahami isi SAK ETAP?	5	25	30	17	83		
2	Pelaku UMKM Melakukan Pembukuan	17	13	30	57	43		
3	Terdapat software akuntansi untuk mendukung pembukuan	9	21	30	30	70		
4	Rutin atau tidak pembukuan pelaporan keuangan	18	12	30	60	40		
5	Entitas memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi	12	18	30	40	60		
6	Entitas memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan	9	21	30	30	70		
7	Entitas menyajikan laporan perubahan posisi keuangan	12	18	30	40	60		
8	Entitas menyajikan laporan laba rugi	11	19	30	37	63		
9	Entitas menyajikan laporan arus kas	12	18	30	40	60		
10	Entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancer	16	14	30	53	47		
11	Entitas menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan	12	18	30	40	60		
12	Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan min 1 kali	13	17	30	43	57		
13	Entitas menyajikan informasi komparatif (perbandingan)	15	15	30	50	50		
14	Tranksaksi diukur berdasarkan biaya historis	11	19	30	37	63		
15	Transaksi diukur berdasarkan nilai wajar	10	20	30	33	67		
16	Saya mengetahui bahwa terdapat standar akuntansi dikoperasi dalam menyusun laporan keuangan	10	20	30	33	67		
17	Saya pernah mendengar tentang SAK ETAP	12	18	30	40	60		
18	Saya memahami serta mengerti praktek SAK ETAP	12	18	30	40	60		

NO	PERTANYAAN	Jawaban		Total	% Jawaban	
		Ya	Tidak		Ya	Tidak
19	Menurut saya SAK ETAP merupakan sebuah pedoman dalam menyusun laporan keuangan	13	17	30	43	57
20	Dengan menerapkan SAK ETAP, kemampuan koperasi dalam melakukan penilaian kinerja usaha akan meningkat	12	18	30	40	60
21	Penerapan SAK ETAP akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dan menilai kinerja koperasi	12	18	30	40	60
22	Koperasi memang sudah seharusnya menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan	10	20	30	33	67
Total Peserta		30 orang				
Rata-rata					40	60

Sumber : Pengolahan data excel (2014)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 83% UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru belum memahami isi SAK ETAP dan 70% tidak menggunakan software atau tidak secara komputerisasi dalam menerapkan akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi selama satu periode serta 70% tidak memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, rata-rata hanya 40% penerapan akuntansi bagi UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa hanya 17% UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang sudah memahami isi SAK ETAP. Mengingat besarnya manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan akuntansi, kepada para pelaku UMKM yang belum menerapkan akuntansi agar mulai menerapkan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bagi *stakeholder* untuk ikut serta dalam mendukung dan mengawasi implementasi SAK ETAP. Selain itu perlu adanya suatu badan pengawas yang khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi dari SAK ETAP sehingga kedepannya seluruh UMKM yang ada di Indonesia dapat menerapkan pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP, begitu juga dengan UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Informasi akuntansi harus dihasilkan tepat waktu agar informasi tersebut relevan sebagaimana yang diisyaratkan oleh SAK ETAP. Untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, sudah seharusnya penerapan akuntansi tersebut dilakukan secara komputerisasi atau dibantu dengan software akuntansi. Dari tabel 5.1 dapat kita lihat hanya 30% UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang menggunakan software akuntansi atau secara komputerisasi untuk menghasilkan informasi akuntansi selama satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tersebut dalam menerapkan akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan belum memenuhi karakteristik mutu informasi yaitu relevan dan tepat waktu sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK ETAP.

Dari tabel 5.1 juga dapat kita lihat hanya 30% UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru yang memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 30% UMKM tersebut yang menyajikan laporan keuangannya secara lengkap atau memenuhi karakteristik mutu informasi akuntansi sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK ETAP.

Secara keseluruhan dapat kita lihat dari tabel 5.1., rata-rata hanya 40% penerapan akuntansi bagi UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru secara lengkap atau sesuai tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi serta sesuai dengan SAK ETAP. Dari hasil wawancara peneliti dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dimana pelaku UMKM Kecamatan Sukajadi secara berkala mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam bentuk pemberian penyuluhan dan pendampingan tentang penerapan akuntansi terutama penyusunan laporan keuangan yang diberikan oleh Penyuluh Kerja Lapangan (PKL) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Bahkan pada waktu tertentu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru juga meningkatkan pengetahuan terkait penerapan akuntansi bagi pelaku UMKM tersebut dengan mengundang pakar dari kalangan praktisi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat membuat simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi.
2. Penerapan akuntansi pada UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru rata-rata belum sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk masa yang akan datang, UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam menerapkan akuntansi lebih lengkap atau mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi.
2. Diharapkan untuk masa yang akan datang, UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat menerapkan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Intan, 2012, Penerapan Sistem Akuntansi Sederhana Pada UKM Cireng Cageur Group Bogor, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56161>
- Astuti, 2010, Perlunya Penerapan Sistem Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 152 – 216
- Deddi, Nordiawan, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Erlangga.
- Ediraras, Dharma T., Akuntansi dan Kinerja UKM, *Jurnal Ekonomi Bisnis* No.2, Volume 15, Agustus 2010, Universitas Gunadarma.
- Harrison, Walter T., 2011, *Akuntansi*, Jilid Satu, Edisi Tujuh, Jakarta, Penerbit Erlangga.

- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2004, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta
- Lilya dan Anantawikrama, 2014, *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif pada Peggy Salon)*.
- Martani,Dwi, 2011, SAK ETAP, dipresentasikan pada seminar di Riau tanggal 15 Maret 2011
- Musmini, Lucy Sri, 2012, *Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja, VOKASI Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No.1, April 2013, ISSN 2337 – 537X. Jurusan Akuntansi Program Diploma III, FEB Undiksha.*
- Reeve, 2005, *Accounting : Pengantar Akuntansi*, Buku satu, Edisi dua puluh satu, Jakarta, Salemba Empat
- Soemarso S.R., 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku satu, Edisi lima, Jakarta, Salemba Empat
- Tanjung, Yulia, Haryani, 2009, *Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT.PLN (Persero) Area Padang*, Jurnal Ekonomi dan kewirausahaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Yenti,Hidayah, 2010, *Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi bagi kelompok tani wanita "Panen Raya" di Kanagarian Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam*, Artikel Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Zulganef, 2006, *Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5*, Bandung, Pustaka.